

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PIUTANG TERHADAP
PEROLEHAN LABA PADA PT PEGADAIAN
CABANG JENEPONTO**

Disusun Oleh :
NUR ASMA
4510012044



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2014**

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PIUTANG TERHADAP
PEROLEHAN LABA PADA PT PEGADAIAN
CABANG JENEPONTO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

UNIVERSITAS

Oleh
BOSOWA

**NUR ASMA
4510012044**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2014

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PIUTANG TERHADAP
PEROLEHAN LABA PADA PT PEGADAIAN
CABANG JENEPONTO**

DiSusun dan diajukan oleh

**NUR ASMA
4510012044**



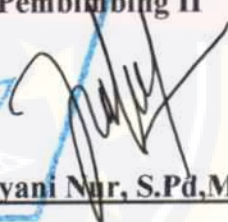
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal 7 Juni 2014

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


(Haeruddin Saleh, SE, M.Si.)

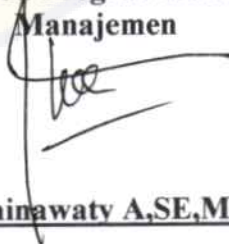

(Indrayani Nur, S.Pd, M.Si.)

Mengetahui :

**Dekan
Fakultas Ekonomi**

**Ketua Program Studi
Manajemen**


(A. Arifuddin Mane, SE, M.Si, SH, MH.)


(Herminawaty A, SE, MM.)

Tanggal Pengesahan :

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekaligus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di jurusan Ekonomi Manajemen pada Universitas “45” Makassar.

Penulisan skripsi ini dilakukan sepenuhnya oleh penulis dengan segala kemampuan dan kesungguhan hati, namun penulis menyadari sebagai manusia yang memiliki keterbatasan tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M Eng selaku Rektor Universitas “45” Makassar
2. A.Arifuddin Mane, SE, M.Si , SH, MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas “45” Makassar.
3. Haeruddin Saleh, SE,M.Si sebagai pembimbing I dan Indrayani Nur,S.Pd, M.Si sebagai pembimbing II atas segala petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan ibu Dosen FE Universitas “45” Makassar yang telah dengan sabar membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis dan juga kepada seluruh staf Fakultas Ekonomi atas bantuannya selama ini.
5. Kepala Cabang serta staf PT Pegadaian Kab. Jeneponto yang telah bersedia menjadi obyek penelitian dan membantu penulis dalam pengumpulan data untuk penulisan ini.
6. Teman teman mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang senantiasa belajar dan berjuang bersama selama masa pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Nenek yang saya cintai yang senantiasa memberikan doa, petuah dan nasehat yang sangat membangun kepribadian penulis
8. Saudara- saudaraku yang tercinta (Ikbal, Hikma, dan Lukman) yang telah memberikan dorongan dan semangat selama penulis menjalani studi dan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa penulis sampaikan rasa haru dan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik material maupun spritual sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tulisan ini. Akhirnya penulis bermunajad kepada Allah SWT dari segala kerendahan hati , penulis

persembahkan skripsi ini dengan harapan semoga bermanfaat bagi kita semua
utamanya bagi penulis.

Makassar, 5 Juni 2014

Penulis

Nur Asma



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Kerangka Teori	5
2.1.1 Manajemen Keuangan.....	5
2.1.2 Lembaga Keuangan	8
2.1.3 Pengertian Piutang	10
2.1.4 Peranan dan Arti Penting Piutang.....	12
2.1.5 Kebijakan Piutang dan Penjualan Kredit	15
2.1.6 Resiko Yang Mungkin Timbul Dalam Piutang	19
2.1.7 Perputaran Piutang	20
2.2 Pengertian Laba	21

2.2.1	Macam dan Jenis-Jenis Laba	23
2.2.2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba	24
2.2.3	Komponen dari Laba.....	26
2.3	Kerangka Pikir	27
2.4	Hipotesis	28
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1	Daerah Penelitian.....	29
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	29
3.3	Jenis Dan Sumber Data.....	30
3.3.1	Jenis Data.....	30
3.3.2	Sumber Data	30
3.4	Metode Analisis	31
3.5	Definisi Operasional	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	34
4.1.1	Sejarah Perkembangan PT Pegadaian.....	34
4.1.2	Struktur Organisasi PT Pegadaian.....	42
4.1.3	Uraian Tugas	45
4.2	Deskripsi Data.....	54
4.2.1	Prosedur dan Cara Pengambilan Kredit	54
4.2.2	Sistem Penyaluran Kredit Gadai Menurut PT Pegadaian Cabang Jeneponto	58
4.3	Analisis Data.....	63

4.3.1 Analisa Korelasi Linear dan Regresi.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran – saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Pikir	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian Cabang Jeneponto	44



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Keadaan Pegawai PT Pegadaian Cabang Kabupaten Jenepono 2013	3
Tabel 4.1	Piutang dan Laba Bersih PT Pegadaian Cabang Kabupaten Jenepono Tahun 2009-2013.....	54
Tabel 4.2	Perkembangan Jumlah Nasabah Pada PT Pegadaian Cabang Jenepono Tahun 2009-2013.....	60
Tabel 4.3	Perubahan Tingkat Sewa Modal	61
Tabel 4.4	Pengaruh Kebijakan Piutang Terhadap Perolehan Laba Pada PT Pegadaian Cabang Jenepono Tahun 2009-2013.....	63



BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyetatkan perekonomian nasional adalah dengan cara penyaluran dana dalam bentuk kredit. Kredit tersebut dapat diberikan kepada masyarakat atau pengusaha yang memerlukan. Sistem penyaluran melalui lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang bergerak dalam intermediasi keuangan dan jasa ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yang termasuk dalam lembaga keuangan yaitu PT Pegadaian. PT Pegadaian merupakan satu-satunya perusahaan gadai (pemegang monopoli) dan keberadaannya merupakan lembaga keuangan non bank.

Pada saat terjadinya krisis ekonomi pembangunan pada tahun 1997, perbankan yang biasanya sangat berperan dalam penyaluran kredit ternyata menghadapi permasalahan yang cukup berat, yaitu ancaman likuidasi. Pada saat itu PT Pegadaian mendapat peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan, khususnya usaha kecil, *pandia, et al* (2004:4). PT Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai (KUH perdata pasal 1150-1106, *pandhuise* No.81/1982 dan PP 10 tahun 1990) dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis.

PT Pegadaian (persero) yang sebelumnya dikenal sebagai Perum Pegadaian yaitu lembaga perkreditan yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, serta pinjaman tidak wajar lainnya. PT Pegadaian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan kredit, baik dalam skala kecil maupun skala besar, dengan pelayanan yang mudah, cepat dan aman. Kemudahan dan kesederhanaan dalam prosedur memperoleh kredit merupakan modal dasar dalam mendekati pangsa pasar pegadaian.

Dengan demikian menurut Triandaru dan Budisantoso (2006:212) pegadaian mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu: (1) gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai, (2) penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain.

Pada dasarnya setiap perusahaan baik yang bergerak di bidang jasa, dagang maupun manufaktur memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh laba dan menjaga kesinambungan perusahaan di masa akan datang. Laba yang maksimal dapat diperoleh melalui peningkatan volume penjualan. Di era globalisasi saat ini, semakin menambah permasalahan bagi manajemen suatu perusahaan di dalam mewujudkan usahanya dan menjalankan aktivitas perusahaan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah proses pengambilan keputusan untuk memberi kredit kepada pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perusahaan harus berdaya upaya untuk mengambil langkah yang tepat melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan perolehan laba.

Salah satu perusahaan jasa pelayanan, PT Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan dana dalam bentuk pemberian kredit bagi masyarakat, baik kalangan menengah ke bawah maupun kalangan ke atas, dengan menerapkan sistem jaminan sebagai pegangan bagi pihak perusahaan. Pegadaian merupakan salah satu dari sedikit perusahaan jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dalam waktu relatif yang sangat singkat karena kesederhanaan prosedur.

Perusahaan yang penulis jadikan obyek pembahasan adalah PT Pegadaian cabang Jeneponto yang merupakan suatu lembaga keuangan non bank yang memberi pinjaman kredit dan pinjaman jasa. Untuk itu perusahaan memperoleh laba atas piutang tersebut. Karena pada saat sekarang ironi terjadi persaingan diantara perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, maka konsekuensinya pada perusahaan ini harus mampu menetapkan kebijakan yaitu penetapan pemberian kredit (piutang) yang tinggi guna menarik minat masyarakat/pengusaha untuk melakukan pinjaman dana.

Tabel 1.1
DAFTAR KEADAAN PEGAWAI PT PEGADAIAN
CABANG KABUPATEN JENEPONTO
2013

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Cabang	1
2	Gudang	2
3	Penaksir Tinggi	1
4	Administrasi	4
5	Penjaga	2
Jumlah		10

Sumber : Kantor PT Pegadaian Cabang Jeneponto

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas judul “Analisis Pengaruh Kebijakan Piutang Terhadap Perolehan Laba PT Pegadaian Cabang Jenepono”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana hubungan antara kebijakan piutang terhadap perolehan laba pada PT Pegadaian Cabang Jenepono”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan piutang terhadap perolehan laba pada PT Pegadaian Cabang Jenepono.
2. Untuk mengetahui hubungan antara kebijakan piutang terhadap perolehan laba pada PT Pegadaian Cabang Jenepono.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi PT Pegadaian Cabang Jenepono tentang pentingnya menetapkan kebijakan piutang terhadap peningkatan perolehan laba.
2. Sebagai landasan bagi pengembangan penelitian selanjutnya khususnya yang ada kaitannya dengan kebijakan piutang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Manajemen keuangan

Manajemen keuangan bukan hanya berkutat seputar pencatatan akuntansi. Dia merupakan bagian penting dari manajemen program dan tidak boleh dipandang sebagai suatu aktivitas tersendiri yang menjadi bagian pekerjaan orang keuangan. Manajemen keuangan lebih merupakan pemeliharaan suatu kendaraan, apabila kita tidak memberinya bahan bakar dan oli yang bagus serta service teratur, maka kendaraan tersebut tidak akan berfungsi secara baik dan efisien. Lebih para lagi, kendaraan tersebut dapat rusak ditengah jalan dan gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.

Jadi manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dengan menggunakannya seefektif, seefisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Seorang menejer keuangan dalam suatu perusahaan harus mengetahui bagaimana mengelola segala unsur dan segi keuangan, hal ini wajib dilakukan karena keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan.

Unsur manajemen keuangan harus diketahui oleh seorang manajer, misalnya seorang manajer keuangan tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi unsur-unsur manajemen keuangan, maka akan muncul kesulitan dalam menjalankan suatu perusahaan tersebut. Sebab itu seorang manajer keuangan harus mampu mengetahui segala aktivitas manajemen keuangan, khususnya menganalisis sumber dana dan penggunaannya untuk merealisasikan keuntungan maksimum bagi perusahaan tersebut. Seorang manajer keuangan harus memahami peredaran uang baik eksternal maupun internal.

Pengertian manajemen keuangan menurut Prawironegoro (2007) adalah “Aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba”.

Selanjutnya pengertian manajemen keuangan dikemukakan oleh Sutrisno (2003:3) yaitu :

“Manajemen keuangan adalah sebagai semua aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.”

Tujuan manajemen keuangan berkaitan dengan keputusan dibidang keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka dari itu nilai perusahaan akan tercermin dari nilai pasar sahamnya semakin tinggi juga nilai perusahaan. Manajemen keuangan memiliki peran dalam kehidupan perusahaan ditentukan oleh perkembangan ekonomi kapitalisme. Pada awal munculnya kapitalisme sebagai sistem ekonomi pada abad 18, manajemen keuangan manajemen

keuangan hanya membahas topik rugi laba. Fungsi manajemen keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Perencanaan Perusahaan:** membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
2. **Penganggaran Keuangan:** tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.
3. **Pengelolaan Keuangan:** menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
4. **Pencarian Keuangan:** mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.
5. **Penyimpanan Keuangan:** mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut.
6. **Pengendalian Keuangan:** melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.
7. **Pemeriksaan Keuangan:** melalui audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.
8. **Pelaporan Keuangan:** penyediaan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi.

2.1.2 Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk likuid dan kewajiban terutama dari simpanan masyarakat serta instrumen-instrumen hutang yang diterbitkan. Oleh karena itu lembaga keuangan mengalokasikan dananya dalam bentuk kredit atau menanamkannya dalam bentuk surat-surat.

Kegiatan usaha lembaga keuangan atau sering pula disebut lembaga perantara keuangan ini sebenarnya cukup kompleks jika di bandingkan dengan badan-badan usaha lainnya meskipun dalam hal lain mereka memiliki kesamaan-kesamaan yaitu pencapaian keuangan yang optimal. Dalam pencapaian tujuan tersebut lembaga keuangan juga membutuhkan masukan lainnya aktiva, tenaga kerja, modal dan tenaga manajemen untuk mempromosikan unit-unit keluasaan yang dibutuhkan nasabah.

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan yang melayani masyarakat yang merupakan suatu jaringan yang terdiri dari: pasar uang dan pasar modal, lembaga dan badan usaha, rumah tangga dan pemerintah. Semua unsur tersebut mendukung sistem keuangan.

Fungsi utama dari lembaga keuangan sesuai dengan namanya adalah mentransfer dananya dari unit surplus kepada unit defisit, dana-dana yang berhasil dihimpun oleh lembaga perantara ini kemudian dialokasikan atau ditempatkan dipasar uang yang akan mempertemukan kepentingan pihak penuplai dana dan pihak yang membutuhkan dana, lembaga keuangan ini antara lain meliputi badan-

badan usaha seperti Bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan reksa dana, perusahaan pembiayaan serta lembaga perkreditan lainnya.

Lembaga keuangan non Bank kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja, misalnya: perusahaan Pegadaian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang bergerak. Lembaga keuangan non Bank tidak dapat secara langsung menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Lembaga keuangan non Bank tidak dapat menciptakan uang giral. Lembaga keuangan sebagai salah satu sektor moneter Indonesia diharapkan dapat memainkan peranan yang semakin penting dalam menggali sumber-sumber pembiayaannya, baik karena kekhususan peranannya yang tidak dimiliki lembaga perbankan umumnya maupun karena keberadaannya.

Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan pada lembaga keuangan dimasa mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan yang cepat, baik jumlah maupun jenis-jenis jasa keuangan yang ditawarkan pada masyarakat.
2. Konsolidasi atau penggabungan lembaga keuangan yang kecil kepada perusahaan yang lebih besar, hal tersebut akan memperluas pasar.
3. Dengan deregulasi akan adanya persaingan dan tempat-tempat sebagai pasar swasta untuk bertransaksi dengan aturan yang lebih luas dalam membantu keputusan manajemen.
4. Adopsi yang cepat terhadap teknik informasi baru dan teknologi komputer untuk menghasilkan dan mengirim jasa-jasa keuangan.

5. Peningkatan persaingan lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan yang sama atau hampir sama dan juga jasa-jasa pasar keuangan dunia akan menjadi lebih dekat dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya.
6. Pertumbuhan yang cepat pada pekerjaan yang baru dan kesempatan berkarir, khususnya pada pengembangan dan pemasaran jasa-jasa keuangan yang baru dan pada penyimpangan informasi dan transfer ekonomi.
7. Penempatan resiko kegagalan lembaga-lembaga yang secara individu sebagai tempat-tempat pasar untuk bertransaksi dengan aturan hukum yang lebih luas dan peraturan yang lebih sempit pada sektor lembaga keuangan.

2.1.3 Pengertian Piutang

Piutang adalah tuntutan (*claims*) terhadap pihak tertentu yang penyelesaiannya diharapkan dalam bentuk kas selama kegiatan normal perusahaan. Klaim timbul karena berbagai sebab, misalnya penjualan secara kredit, pemberian pinjaman kepada karyawan, porsekot dalam kontrak pembelian porsekot kepada karyawan, dan lain-lain. Tidak semua klaim tersebut disebut sebagai piutang. Berikut ini beberapa bentuk klaim antara lain klaim terhadap kelebihan pembayaran pajak, klaim terhadap perusahaan angkutan atas barang yang rusak atau hilang dalam perjalanan, klaim ganti rugi terhadap perusahaan asuransi, piutang terhadap pemesan saham, piutang penghasilan yaitu penghasilan yang sudah terjadi tetapi belum diterima, bunga yang masih harus diterima, sewa yang masih harus diterima dan lain-lain.

Piutang (*account receivable*) timbul akibat adanya penjualan kredit. Sebagian besar perusahaan menjual secara kredit agar dapat menjual lebih banyak



produk atau jasa. Istilah piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu perusahaan, dan organisasi lainnya. Ada beberapa ahli yang mengemukakan definisi piutang antara lain sebagai berikut:

M. Munandar (2006:77) yang mengemukakan bahwa piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang nantinya kan dimintakan pembayarannya bilamana telah sampai jatuh tempo.

Selanjutnya pengertian piutang di kemukakan oleh Prastowo Julianty (2002:147) yaitu:

“Piutang berisikan pemberian kredit yang diberikan perusahaan kepada konsumennya ketika menjual barangnya. Mereka mengambil setiap bentuk penjualan kredit dimana perusahaan meneruskannya kembali kepada perusahaan lain.”

Menurut Mulyadi (2002 : 87) “piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan”. Piutang umumnya di sajikan dineraca dalam dua kelompok, piutang usaha dan piutang non usaha.

Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari (tiga puluh hari) sampai dengan 90 hari (sembilan puluh hari). Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa yang dijual secara kredit. Pada umumnya piutang timbul

akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, dimana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Mengingat piutang merupakan harta perusahaan yang sangat likuid maka harus dilakukan prosedur yang wajar dan cara-cara memuaskan dengan para debitur sehingga perlu disusun suatu prosedur yang baik demi kemajuan perusahaan.

Dari beberapa defenisi tentang piutang diatas dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan tagihan kepada pihak lain (debitur) atau pelanggan sebagai akibat dari penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dilakukan secara kredit atau memberikan pinjaman kepada karyawan, memberi uang muka pada anak perusahaan, atau penjualan aktiva tetap. Atau secara singkat, piutang merupakan tuntutan perusahaan kepada pihak lain, dimana pihak yang dituntut wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

2.1.4 Peranan dan Arti Penting Piutang

Piutang merupakan elemen modal kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja yaitu: Kas, barang, Piutang, kas. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa elemen piutang mempunyai tingkat likuiditas yang tidak selikuid elemen kas, karena untuk menjadikan piutang dalam bentuk uang tunai memerlukan waktu yang tergantung dari syarat kredit yang diberikan oleh perusahaan dan kelancaran pengembaliannya. Oleh karena itu semakin besar nilai elemen piutang semakin besar pula resiko yang timbul. Disamping itu, dana yang tertanam didalamnya

semakin besar sehingga kebutuhan dana dalam perputaran modal kerja menjadi besar pula.

Pada umumnya perusahaan melakukan penjualan kredit untuk dapat mempertahankan pelanggan yang sudah ada sekarang dan untuk menarik pelanggan baru. Dari penjualan kredit akan menimbulkan penagihan atau piutang kepada pelanggan yang sangat erat hubungannya dengan persyaratan-persyaratan kredit yang diberikan. Karena piutang merupakan salah satu investasi dari aktiva lancar, maka piutang dianggap memiliki waktu perputaran yang cepat dari satu tahun sehingga aktiva ini mudah dicairkan menjadi uang kas.

Pos piutang dalam neraca biasanya merupakan bagian yang cukup besar dari aktiva lancar sehingga memerlukan perhatian yang cukup serius agar perkiraan piutang ini dapat diatur dengan cara seefisien mungkin.

Piutang usaha timbul karena penjualan produk atau jasa dalam rangka kegiatan normal usaha, sementara piutang yang timbul di luar kegiatan normal usaha digolongkan sebagai piutang lain-lain.

Menurut Warren, Reeve, dan Fees yang diterjemahkan oleh Faramita, A., Amanagrahani, Hendrawan T. (2008:356) jenis piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Piutang Dagang (*Account Receivable*)

Transaksi paling umum yang menciptakan piutang adalah penjualan barang dagang/jasa secara kredit. Piutang usaha (*account reseivables*) semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu 30-60 hari. Piutang usaha diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar.

2. Wesel Tagih (*Notes Receivable*)

Sepanjang wesel tagih dapat ditagih dalam setahun, maka biasanya diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Wesel tagih (*notes receivable*) adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan, dimana pelanggan dimaksud telah menerbitkan surat hutang formal pada perusahaan.

3. Piutang Lain (*Other Receivable*)

Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam satu tahun, maka piutang tersebut dikategorikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihnya lebih dari satu tahun, maka dikategorikan sebagai piutang tidak lancar.

Perilaku piutang dapat memberikan gambaran kepada manajemen mengenai kegiatan –kegiatan yang terkait adanya piutang. Informasi tersebut dapat memberikan masukan yang berharga dalam mengambil keputusan. Dimulai dari kebijakan piutang yang dibuat untuk memberikan pedoman kerja bagi pengelolaan piutang. Perencanaan merupakan tahap lanjut dari kebijakan yang menetapkan besar dan waktu pengumpulan piutang terkait dengan arus kas perusahaan. Siklus piutang menggambarkan proses terjadinya piutang sampai dengan pelunasan piutang, tahap ini dapat mendeteksi keterlambatan yang terjadi. Tahap berikutnya, pengumpulan dan penagihan piutang perlu mendapat perhatian khusus karena dibutuhkan kesabaran dan upaya maksimal untuk mencapai target. Sedangkan penilaian piutang dapat memberikan gambaran jumlah keterlambatan pembayaran piutang dan piutang yang tak tertagih karena kebijakan yang terlalu longgar atau kemampuan penagihan yang kurang maksimal.

2.1.5 Kebijakan Piutang dan Penjualan Kredit

Tujuan perusahaan menjual barang secara kredit adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Dengan adanya volume penjualan maka diharapkan akan menaikkan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan, oleh karena itu kebijakan pemberian piutang seharusnya bisa menambah laba perusahaan.

Hal ini disebabkan karena disatu sisi volume penjualan diharapkan naik dengan penjualan kredit akan menimbulkan investasi pada piutang tertentu saja yang mempunyai biaya dana cost of capital.

Oleh karena itu kebijakan piutang perlu dianalisa apakah memang ada tambahan manfaat (keuntungan) yang didapatkan oleh perusahaan atau tidak. Sebelum membicarakan tentang piutang lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan piutang.

Para pakar telah memberikan defenisi tentang kebijakan piutang antara lain :

Menurut Sutrisno (2000:72) kebijakan piutang yaitu :

“kebijakan piutang adalah perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang akan ditanggung perusahaan”.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam kebijakan piutang yaitu :

1. Standar kredit atau kemampuan pelanggan didalam pembayaran kredit.
2. Jangka waktu kredit yaitu berapa lama seorang konsumen yang membeli secara kredit bisa melunasi hutangnya.
3. Adanya potongan yang diberikan kepada para pelanggan.

kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lain atas penundaan pembayaran atas barang atau jasa yang manfaatnya dirasakan saat ini dengan pembayaran yang dilakukan dimasa yang akan datang. Pemberian kredit dilakukan menurut prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya kebijakan kredit diharapkan pembeli dapat menepati jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan. Kebijakan piutang kredit menyangkut kegiatan untuk menentukan seberapa besar perusahaan dapat melakukan penjualan kredit dan kepada siapa saja perusahaan dapat menjual secara kredit. Dal hal ini, perusahaan harus menilai/mengevaluasi kemampuan baik pelanggan likuiditas, aktivitas, solvabilitas, maupun profitabilitasnya.

Penjualan kredit tentu akan menimbulkan resiko bagi perusahaan untuk menagih sebagian atau bahkan mungkin seluruh piutang, maka biaya atas resiko tidak tertagihnya piutang tersebut dalam bentuk *bad debt expense*. Kebijakan penjualan kredit dapat menimbulkan keuntungan-keuntungan dalam bentuk kenaikan hasil penjualan, kenaikan laba yang memenangkan persaingan.

Manajemen piutang berkaitan dengan usaha untuk mengelola pendapatan yang akan diterima dari hasil penjualan yang dilakukan secara kredit. (Syahsunan, 2004:61) manejer keuangan dalam melakukan manajemen piutang harus dapat menentukan jumlah piutang yang seimbang antara perolehan laba dan resiko. Pengelolaan piutang yang efisien diawali dengan penyeleksian pelanggan hingga usaha-usaha penagihan piutang yang lebih efektif.

a) Kebijakan kredit

Untuk mengendalikan piutang, perusahaan perlu menetapkan kebijakan kreditnya. Kebijakan ini berfungsi sebagai standar, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka perusahaan harus melakukan perbaikan. Jika suatu perusahaan memutuskan untuk menjual produknya secara kredit, timbul masalah tentang siapa yang akan diizinkan untuk membeli secara kredit. Perlu ditentukan standar dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap pembeli.

b) Standar Kredit

Standar kredit adalah persyaratan minimum yang dipakai perusahaan untuk memberikan kredit kepada pelanggan. Hal-hal seperti nama baik pelanggan sehubungan dengan kredit atau pembayaran hutang-hutang dagangnya baik kepada perusahaan maupun perusahaan-perusahaan lainnya, referensi-referensi kredit, rata-rata jangka waktu pembayaran hutang dagang dan beberapa rasio finansial tertentu dari perusahaan langganan yang akan dapat memberikan suatu dasar penilaian bagi perusahaan sebelum memberikan atau melakukan penjualan kredit.

Menurut Bambang Riyanto dalam Rahmasari (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang adalah :

a. Volume penjualan kredit

Semakin besar volume penjualan kredit dari keseluruhan penjualan semakin besar piutang yang timbul dan semakin besar pula resiko yang mungkin timbul, disamping memperbesar profitabilitas.

b. Syarat pembayaran Kredit

Syarat pembayaran kredit dapat bersifat ketat atau bersifat lunak misalnya 2/10 net 30 yang artinya bahwa pembayaran piutang dilakukan dalam waktu 10 hari sesudah waktu penyerahan barang, maka pembelian akan dipotong tunai sebesar 2% dari harga penjualan kredit dan pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sesudah waktu penyerahan.

c. Ketentuan tentang pembatasan kredit

Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas minimal atau maksimal atau plafond yang ditetapkan masing-masing langganan. Demikian pula ketentuan mengenai siapa yang dapat diberi kredit.

d. Kebijakan dalam Pengumpulan Piutang

Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan pengumpulan piutang secara aktif akan menambah pengeluaran untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang secara pasif.

e. Kebiasaan membayar dari para langganan

Kebiasaan membayar dari para langganan ada yang sebagian menyukai cara menggunakan kesempatan untuk mendapatkan potongan tunai, dan sebagian yang lain ada yang tidak menggunakan kesempatan tersebut. Perbedaan cara pembayaran tersebut tergantung pada jarak penilaian mereka terhadap alternatif mana yang lebih menguntungkan.

Oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang adalah semakin besar volume penjualan kredit dari keseluruhan penjualan

semakin besar piutang pula kebutuhan dana yang ditanakan dalam piutang adapun syarat pembayaran kredit dapat bersifat ketat atau bersifat lunak.

2.1.6 Resiko Yang Mungkin Timbul Dalam Piutang

Dengan penjualan kredit, diharapkan volume penjualan akan lebih besar jika dibandingkan dengan penjualan yang dilakukan lebih besar jika dibandingkan dengan penjualan yang dilakukan dengan secara tunai saja. Akan tetapi penjualan kredit sedikit banyak akan menimbulkan resiko tidak dibayarkannya piutang oleh sebagian dari langganan perusahaan. Menurut Mujati Suaidah (2008:8), adapun resiko diantaranya adalah:

a. **Resiko Tidak Dibayarkannya Seluruh Jumlah Piutang.**

Resiko ini adalah resiko yang paling berat yang harus ditanggung oleh perusahaan yang menjual secara kredit, karena tidak dibayarkannya seluruh jumlah piutang, sehingga perusahaan akan menanggung kerugian sebesar jumlah piutang tersebut. Resiko tersebut bisa terjadi bila seorang langganan sengaja menipu, melarikan diri, atau bangkrut usahanya yang menyebabkan piutang tersebut tidak terbayar seluruhnya.

b. **Resiko Tidak Dibayarkannya Sebagian Piutang.**

Walaupun piutang telah dibayarkan sebagian, tetapi hal ini juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena kemungkinan sebagian dari piutang tersebut tidak dibayar.

c. **Resiko Keterlambatan Didalam Melunasi piutang.**

Resiko keterlambatan dalam melunasi piutang lebih ringan dibandingkan kedua resiko diatas, karena pada akhirnya piutang yang telah diberikan oleh perusahaan akan dibayar oleh pihak debitur.

d. Resiko Tertanamnya Modal Dalam piutang.

Apabila perusahaan memberikan piutang maka dengan sendirinya terdapat modal yang tertanam dalam piutang tersebut. Apabila investasi dalam piutang terlalu besar jumlahnya akan mengakibatkan kontinuitas perusahaan. Oleh karena itu sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit oleh para langganan, perlu diadakan evaluasi kredit terlebih dahulu.

2.1.7 Perputaran Piutang

Kelancaran penerimaan piutang dan pengukuran baik tidaknya investasi dalam piutang dapat diketahui dari tingkat perputarannya. Perputaran piutang adalah masa-masa penerimaan piutang adari suatu perusahaan selama periode tertentu. Perputaran piutang akan menunjukkan berapa kali piutang yang timbul sampai piutang tersebut dapat tertagih kembali kedalam kas perusahaan.

Menurut Bambang Rianto dalam Bramasto, Ari (2008:215), perputaran piutang adalah rasio yang memperlihatkan lamanya waktu untuk mnegubah piutang menjadi kas. Putaran piutang dihitung dengan membagi penjualan kredit bersih dengan saldo rata-rata piutang. Piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempunyai hubungan erat dengan volume penjualan kredit. Posisi piutang dapat dihitung dengan menggunakan rasio perputaran piutang.

Rumus menghitung perputaran piutang

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Rata-Rata Piutang}} = \dots\dots\dots \text{Kali}$$

Rumus menghitung rata-rata piutang

$$\text{Rata-Rata Piutang} = \frac{\text{Piutang Awal Tahun} + \text{Piutang Akhir Tahun}}{2}$$

Rumus menghitung pengumpulan piutang

$$\text{Rata-Rata Pengumpulan piutang} = \frac{360}{\text{Perputaran Piutang}}$$

2.2 Pengertian Laba

Laba atau keuntungan didefinisikan dengan dua cara. Yang pertama laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan). Sementara itu laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Perbedaan diantara keduanya adalah dalam hal pendefinisian biaya.

Kegiatan perusahaan sudah dapat dipastikan berorientasi pada keuntungan atau laba. Menurut Soemarso (2004:245) laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba sejauh mana

sesuatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu.

Menurut Sofyan Syafri H, (2004) dalam Aliyal Azmi (2007:12) mendefinisikan laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Kemudian menurut Stice, Stice, Skousen (2009:240) laba adalah pengambilan atas investasi kepada pemilik. Hal ini mengukur nilai yang dapat diberikan oleh entitas kepada investor dan entitas masih memiliki kekayaan yang sama dengan posisi awalnya.

Selanjutnya pengertian laba dikemukakan oleh Suwardjono (2008:464) yaitu:

“Laba adalah sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa).

Menurut Rahmat (2006:9) laba dipandang sebagai suatu peralatan prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Laba terdiri dari hasil operasional, atau luar biasa dan hasil-hasil non- operasional, atau keuntungan dan kerugian luar biasa, dimana jumlah keseluruhannya sama dengan laba bersih . laba biasa dianggap bersifat masa kini (*current*) dan berulang, sedangkan keuntungan dan kerugian luar biasa tidak demikian. Umumnya perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu memperoleh laba yang optimal dengan pengorbanan yang minimal untuk mencapai hal tertentu perlu adanya perencanaan dan pengendalian dalam setiap

aktivitas usahanya agar perusahaan dapat membiayai seluruh kegiatan yang berlangsung secara terus menerus.

2.2.1 Macam dan Jenis – Jenis Laba

Setiap jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba mempunyai suatu perhitungan sendiri seperti menurut Stice, Stice dan Skousen dalam bukunya "*Intermediate Accounting*". Jenis-jenis laba dalam kaitannya dengan perhitungan laba-rugi terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Laba kotor.

Yang dimaksud dengan laba kotor adalah selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok persediaan.

2. Laba operasional.

Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas yang termasuk rencana-rencana kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam ekonomi yang dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karena itu, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pada pemilik modal.

3. Laba sebelum dikurangi pajak.

Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil usaha dan dikurangi biaya diluar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu dalam hal pajak, angka itu adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan.

4. Laba sesudah pajak atau laba bersih.

Laba sesudah pajak atau laba bersih merupakan laba setelah dikurangi dengan pajak. Laba bersih dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan atau *Retained Earnings*. Dalam perkiraan ini akan diambil suatu jumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

Perhitungan laba suatu perusahaan dapat dilakukan setiap bulan, untuk tujuan praktis perhitungan laba sebaiknya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Perhitungan ini dituangkan dalam suatu laporan laba rugi, bersamaan dengan penyusunan laporan neraca. Perhitungan laba ini umumnya mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. Tujuan Intern

Tujuan ini berhubungan dengan usaha pimpinan untuk menyerahkan aktivitas perusahaan pada kegiatan yang menguntungkan. Informasi tentang laba dapat dipergunakan oleh pimpinan untuk mengevaluasi aktifitas operasi perusahaan dalam periode yang lalu, dan untuk menganalisis dan memperbaikinya serta meningkatkan kemampuan unit usaha dalam menghasilkan laba.

2. Tujuan Ekstern.

Tujuan Ekstern merupakan perhitungan laba yang ditujukan untuk memberi pertanggung jawaban pada pemegang saham untuk keperluan pajak, untuk emisi saham di bursa efek serta untuk permohonan kredit pada pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

2.2.2 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Laba

Laba merupakan pos yang penting dan paling dasar dari iktisar keuangan yang memiliki banyak kegunaan. Dalam berbagai konteks laba pada umumnya dipandang sebagai dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan, pembayaran dividen, pedoman investasi, pengambilan keputusan (decision making), dan unsur prediksi.

Menurut Mulyadi dalam buku "Akuntansi Manajemen" mengemukakan bahwa "Faktor-faktor yang mempengaruhi laba, antara lain :

1. Biaya

Biaya yang dapat timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.

2. Harga Jual

Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan.

3. Volume penjualan atau produksi

Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi .

a. Perubahan dalam prinsip akuntansi adalah perubahan yang diterima umumnya dengan prinsip lain yang juga diterima umum yang lebih baik, misalnya menggunakan metode penyusutan straight line yang sebelumnya declining balance, FIFO ke LIFO dan sebagainya.

b. Perubahan dalam taksiran adalah merubah taksiran dari yang ditetapkan setelah taksiran tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita taksir, contoh taksiran umur, taksiran deposit, barang tambang dan lain-lain jika

beberapa lama kiat mendapat informasi yang baru sehingga mengubah taksiran yang lam tersebut.

- c. Perubahan dalam pelaporan entity adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan yang material yang terjadi dalam entity yang sebelumnya dilaporkan melalui laporan keuangan misalnya anak perusahaan yang sebelumnya dilaporkan mengalami perubahan penting dibandingkan dengan sebelumnya". (2002:333)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi laba yaitu biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah produk, dan harga jual mempengaruhi penjualan, dan besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi, kemudian perubahan dalam prinsip akuntansi, perubahan dalam taksiran, dan perubahan dalam laporan entity.

2.2.3 Komponen Dari Laba

Perhitungan untuk memperoleh laba adalah tolak dari pendapatan dikurangi dengan total biaya sama dengan laba. Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No 13 memberikan pengertian pendapatan sebagai berikut :

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.(2004:23)

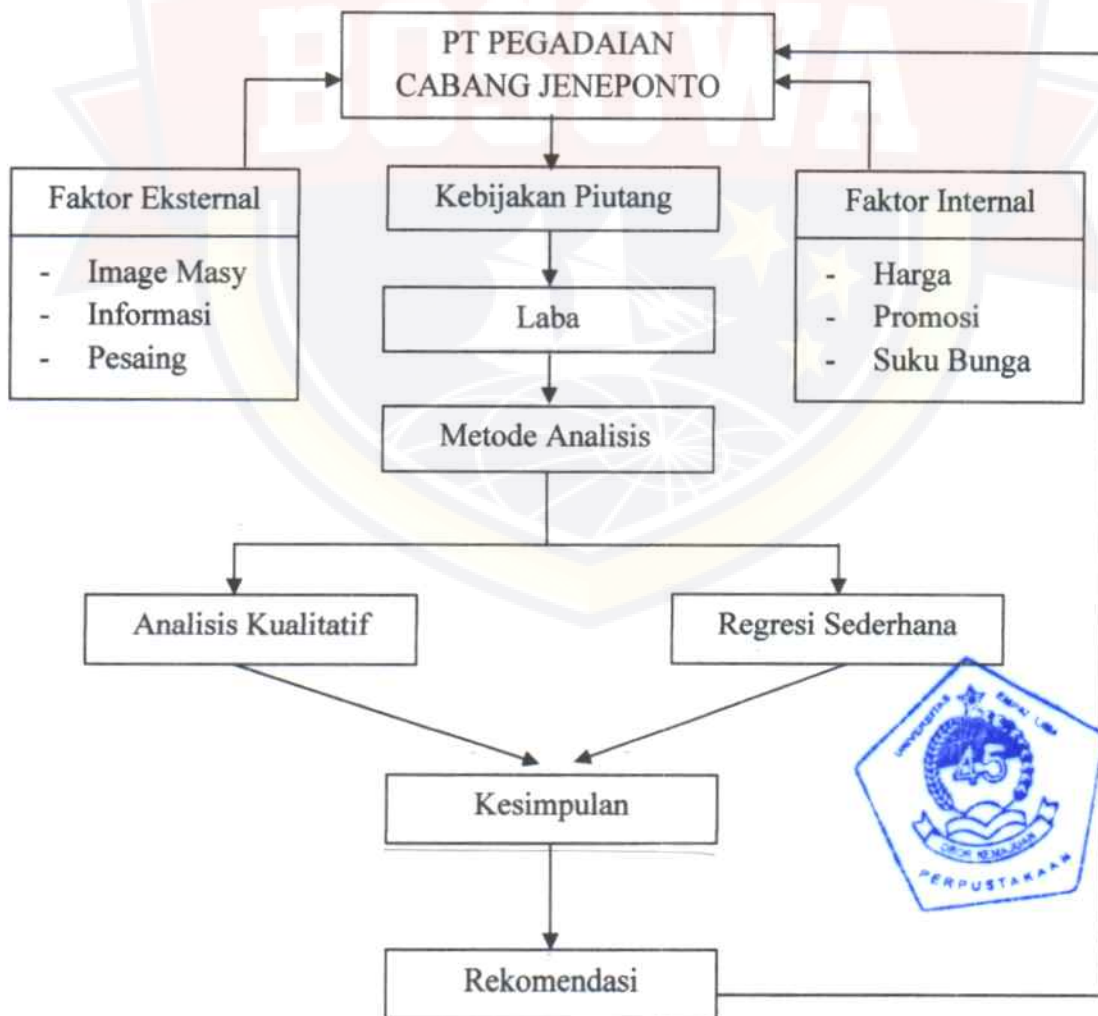
Dari pengrtian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan arus masuk bruto yang timbul dari aktivitas perusahaan. Sedangkan pengertian

biaya menurut Bambang Hariadi dengan bukunya “Akuntansi Manajemen Suatu Sudut Pandang” terdapat dua istilah biaya adalah sebagai berikut :

“ Biaya (*cost*) apabila biaya tersebut belum digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa atau belum habis digunakan. Sedangkan biaya (*expense*) jika biaya tersebut habis digunakan untuk memproduksi suatu produk atau jasa yang menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang”.(2002:237). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya habis jika memproduksi suatu produk yang menghasilkan pendapatan.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang digunakan dalam penulisan ini dapat dikemukakan yaitu :



2.4 Hipotesis

Berdasarkan pengamatan penulis untuk permasalahan yang ada maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

“ Diduga bahwa kebijakan piutang yang ditetapkan dapat mempengaruhi tingkat perolehan laba.”.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Dalam penulisan proposal ini yang menjadi obyek penelitian adalah PT Pegadaian cabang Jenepono. Obyek ini berkaitan dengan kebijakan piutang terhadap perolehan laba dari tahun 2009-2013. Sedangkan waktu penelitian yang digunakan dalam penulisan ini diperkirakan kurang lebih dua bulan lamanya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data melalui penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu bentuk penelitian, dimana penelitian langsung dilakukan pada PT Pegadaian cabang Jenepono.

a. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung obyek penelitian dalam penulisan ini.

b. Interview

Teknik interview dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan dan sejumlah personil yang berkaitan dengan penelitian kebijakan keuangan.

c. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Yaitu penelitian dilakukan dengan jalan menghimpun data yang bersifat teoritis dari buku-buku dan literatur serta catatan yang berkaitan dengan materi penulisan ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kuantitatif, yaitu data numeric yang dapat memberikan penafsiran yang kokoh atau dengan kata lain data ini berupa angka-angka yang diperoleh dari laporan keuangan PT Pegadaian Cabang Jenepono.
2. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi, baik secara lisan maupun tulisan dan dapat digunakan untuk mendukung data lainnya.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penulisan ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari observasi langsung serta wawancara dengan karyawan perusahaan
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen perusahaan dan laporan lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang meliputi data laporan keuangan selama 5 tahun terakhir sejak 2009-2013, buku-buku, literatur perusahaan, serta data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.4 Metode Analisis

1. Metode Kualitatif, yaitu metode bertujuan untuk menguraikan kebijaksanaan yang ditempuh perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan perolehan laba yang telah diperoleh.
2. Metode Regresi Sederhana

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan model regresi sederhana

Model regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + b x$$

Dimana :

Y = Nilai perolehan laba bersih tahun 2013

X = Nilai peningkatan piutang tahun 2013

a = Besarnya nilai konstanta yang menunjukkan rata-rata besarnya perolehan laba bersih tahun 2013

b = Besarnya nilai koefisien yang berpengaruh pada peningkatan piutang terhadap perolehan laba bersih.

Nilai a dan b diperoleh dengan menggunakan model sebagai berikut:

$$a = (\sum Y - b \sum X) / n$$

$$b = \frac{\sum X Y - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

kemudian untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel Y dan X digunakan analisis koefisien korelasi.

$$r = \frac{n \sum X Y - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Dimana :

r = koefisien korelasi

n = Tahun

Y = Jumlah perolehan laba bersih

X = Tingkat piutang

Σ = Jumlah

3.5 Definisi Operasional

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Analisis kebijakan keuangan merupakan analisis mengenai kebijakan keuangan yang diambil oleh PT Pegadaian yang digunakan untuk menggalakan pembentukan dana masyarakat dan membiayai kegiatan ekonomi sesuai kualitas.
2. PT Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan ciri yang khusus yaitu secara hokun gadai.
3. Piutang adalah tuntutan (*claims*) terhadap pihak tertentu yang penyelesaiannya diharapkan dalam bentuk kas selama kegiatan normal perusahaan.
4. Laba adalah sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa atau kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat pada dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang dan jasa.

5. Laba bersih adalah hasil dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak.
6. Kebijakan piutang adalah pemberian kredit dilakukan menurut prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
7. Kebijakan kredit adalah suatu ketentuan atau prosedur yang disusun untuk dijadikan suatu pedoman kredit.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perkembangan PT Pegadaian

Untuk memahami dan mendalami sejarah perkembangan PT Pegadaian serta asal mula terbentuknya badan-badan yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak akan lebih jelas bila kita menelusuri perkembangan keadaan sejarah sebelum Indonesia merdeka.

Timbulnya badan-badan yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak adalah di mulai sejak abad pertengahan di Italia Utara (Lombardia) yang kebanyakan di tangani oleh orang Yahudi, kemudian pada abad ke X dan, ke XI lembaga-lembaga pinjaman uang ini menyebar ke negara-negara Eropa di bawa oleh orang Yahudi.

Dalam memberikan pinjaman uang ini, keuntungan yang besar-besarnya yang mereka cari sehingga terlihat adanya unsur pemasaran, melalui kenyataan demikian timbul. Pemikiran-pemikiran baru oleh Frater Frascian dengan mengadakan pinjaman tanpa bunga, untuk meringankan beban rakyat, sehingga diikuti oleh golongan-golongan lain, sehingga banyak lembaga, sosial yang serupa berdiri meskipun dalam perkembangan selanjutnya mereka memungut bunga juga. Pada tahun 1250, Credire Instelling ini meluas masuk Lombade atau Lommet berasal dari kata, Lombarden, dalam perkembangannya selalu dilakukan sedemikian rupa, sehingga terjadi lembaga kredit yang lebih teratur dengan nama Bank Van Leening. Lembaga inilah yang merupakan lembaga perkreditan dengan

cara gadai tertua. Kemudian pada waktu Indonesia dibawah kekuasaan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) Bank Van Leening ikut dibawa ke Indonesia pada tahun 1746. Perkembangan sampai sekarang lembaga perkreditan yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak, pegadaian di Indonesia telah mengalami 5 (lima) zaman yaitu:

1. Pegadaian Pada Masa VOC (1746-1811)

Gubernur jenderal Van Inhoff dengan Surat keputusan tanggal 20 Agustus 1746 dengan resmi mendirikan Bank Van Leening yang pertama di Jakarta (Batavia), Bank ini didirikan dalam bentuk kerjasama antara VOC dan swasta lainnya yaitu dengan 2/3 modal VOC dan 1/3 dari swasta.

Karena Bank Van Leening dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan timbulnya kehendak agar Bank ini dapat sepenuhnya dikuasai oleh VOC, maka pada tahun 1704 dikeluarkan Surat Keputusan untuk membubarkan Bank Van Leening dan sebagai gantinya didirikan lembaga kredit yang sama dan tugasnya khusus memberikan kredit saja dan modal milik VOC.

Pada tahun 1800 VOC dibubarkan, pengurusan di Indonesia beralih ketangan Hindia Belanda karena akibat dari perahlian ini tidak mempengaruhi pertumbuhan Bank Van Leening, bahkan Gubernur Jenderal Deandaras memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat digadaikan Emas, Perak, Permata, sebahagian kecil perabot rumah tangga dan sejenisnya yang dapat disimpan tiga belas bulan.

2. Pegadaian Pada Masa Penjajahan Inggris (1811-1816)

Bank Van Leening dibubarkan oleh Raffles, sebab menurut Raffles tidak wajar apabila Bank diusahakan oleh pemerintah maka pengusahaannya pihak, swasta asal mendapat izin (*Licentie*) dan pengusaha daerah setempat. Hal ini ternyata tidak menguntungkan bagi pemerintah justru malahan sangat merugikan rakyat karena pemegang licentie menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk melakukan praktek-praktek riba, dengan akibat demikian pada tahun 1814 *Licentie Stel* sel dihapus dan diganti dengan *Pach Stelsel* yaitu hak mendirikan pegadaian diberikan pada umum yang memberikan penawaran paling tinggi (*Openbear Verpact*), sehingga dengan demikian setiap orang boleh menerima gadai asal sanggup membayar sejumlah uang tertentu kepada pemerintah.

3. Pegadaian Pada Masa Penjajahan Belanda (1816-1942)

Pach Stelsel sampai dengan tahun 1843 telah dijalankan diseluruh Indonesia kecuali di daerah Priangan dan *Vorstenlander* (Surakarta dan Yogyakarta) pada tahun 1949 tarif bunga ditentukan oleh pemerintah dan *Pach Stelsel* ditetapkan sebagai monopoli pemerintah. Hal ini berarti bahwa selain pemegang *Pach*, orang dilarang menerima gadai sampai jumlah 100, larangan tersebut tercantum dalam pasal 509 dan masih berlaku sampai sekarang.

Pada tahun 1856 diadakan penelitian oleh pemerintah Hindia Belanda dan ternyata bahwa ada penyelewengan-penyelewengan yang merugikan masyarakat antara lain: suku bunga di naikkan, barang jaminan yang tidak ditebus tidak dijual di muka umum melainkan dimiliki sendiri, uang kelebihan yang menjadi hak

memberi gadai setelah dikurangi penulisan tidak dibayarkan kepada yang berhak dan tata usaha tidak teratur.

Pada tahun 1870 Pach Stelsel dihapuskan dan kemudian dihidupkan lagi *Licentie Stelsel* 1869 No. 85 Sistem ini ternyata tidak juga membawa perbaikan bahkan memberatkan para penggadai dan mengurangi pendapatan negara serta mengurangi lintah darat.

Maka timbullah gagasan pemerintah untuk mengurus diri sendiri pegadaian, tetapi karena dipandang belum mampu menyelenggarakan sendiri, pemerintah tidak berani menggantikan kedudukan para pemilik pegadain tersebut.

Pada tahun 1880 dengan Stablad No. 17 Pach Stelsel dijalankan lagi mengingat pengalaman beberapa tahun yang lalu maka Pach Stelsel yang dijalankan kontrol terhadap Pachlers, yang pelkasanaannya diserahkan kepada Pamong Praja, pengawasannya antara lain peraturan bunga, tarif bunga, harus dicantumkan didepan pegadaian, larangan pegadaian dijadikan tempat madat administrasi yang teratur, penyimpanan barang-barang jaminan yang baik, pemberi ganti rugi terhadap barang yang hilang atau rusak, menyelenggarakan lelang barang-barang jaminan didepan umum serta hak-hak dari penggadai.

Ketentuan-ketentuan ini tidak disukai oleh para Pachlers yang kebanyakan terdiri dari orang-orang China, mereka mengadakan pemboikotan yang berakibat jumlah pegadaian pach merosot, dipihak lain kecurangan masih berjalan sementara gagasan-gagasan semula untuk menangani sendiri pegadaian oleh pemerintah ditambahkan lagi.

Pada tahun 1900 De Wolf Vpin Westerode ditugaskan untuk mengadakan penyelidikan mengenai kemungkinan pegadaian diusahakan sendiri oleh pemerintah dengan dibantu oleh:

- a. F11DH. Van Ende (Kontrolir BB)
- b. EWPHM. Nittel (kontrollir BB)
- c. KC. Barkev (Aspirant kontrollir BB)
- d. TH. Van Dissel (Amternaar, Departemen Keuangan)

Dari hasil penyelidikan tersebut didapat kesimpulan bahwa usaha penggadaian oleh pemerintah akan menguntungkan dan dalam rangka pemberantasan lintah darat, dengan demikian usaha pemerintah dalam mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, penggadaian gelap dan riba lainnya, maka untuk membuktikan hal tersebut diatas usul De Wolf Can. Westerode yaitu dengan Keputusan Pemerintah tanggal 12 Maret 1901 dengan Stablad No. 131 ditetapkannya tanggal, 1 April 1901 dibuka pegadaian yang pertama di Indonesia di sukabumi.

Selanjutnya diikuti dengan didirikannya pegadaian di Cianjur pada tahun 1902 serta pada tahun 1903 di Purworejo, Tasikmalaya, Cikakak Bandung dan Cimahi.

Sampai tahun 1917 pegadaian di Jawa dan Madura sudah ditangani seluruhnya oleh pemerintah, diluar Jawa dan Madura umumnya swasta, masih mempunyai kesempatan mendirikan pegadaian partikelir sesudah mendapat *Licentie* dari pemerintah.

Baru pada tahun 1921 dengan Stablad No. Jo 420 ditetapkan bahwa penyelenggaraan pegadaian diluar Jawa dan Madura dilakukan oleh pemerintah (KUHP pasal 509 berlaku pula untuk seluruh Indonesia). Kemudian dalam tahun 1930 dengan Stablad No. 226 Jawatan Penggadaian Negara dalam arti 21 BW Stabland tahun No. 419, sehingga kekayaan negara yang tertanam dalam usaha jawatan pegadaian diadministrasikan terpisah dari bagian kekayaan negara lainnya.

Dalam hal lelang barang jaminan yang sudah habis jatuh temponya tidak lagi dilakukan oleh balai lelang, tetapi diselenggarakan oleh PT Pegadaian sendiri dengan pertimbangan bahwa para kepala pegadaian akan lebih mengetahui tentang harga barang jaminan dari pada balai lelang (*Vendu Meester*) Stabland tahun 1933 No. 341.

4. Pegadaian Dimasa Penjajahan Jepang (1942-1945)

Di masa penjajahan Jepang tidak ada koordinasi antara pegadaian di Jawa dan di luar Jawa, sehingga pengawasannya berbeda-beda, di Jawa pengawasannya di bawah Guseikandu Zaimubu Bukit Tinggi dan lain-lain daerah dibawah pengawasan Meinsibu Makassar. Walaupun demikian tetap ada dan dapat melaksanakan fungsinya. Karena pucuk pimpinan pegadaian beralih, yang mana kantor-kantor inspeksi di hapus dan banyak kontrolir, disesuaikan menurut keresidenan, berkas Hoof Behehener. Behehener bangsa Indonesia Behehener, kelas satu dijadikan Kontrolir.

Pada tanggal 1 Desember 1943 pegadaian di daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta yang berjumlah 44 buah diserahkan dan dibawah pengawasan dan

pengurusan daerah swapraja sendiri sehingga kantor pusat pegadaian tidak mempunyai hak campur tangan terhadap pegadaian di daerah- daerah tersebut.

Di masa kekuasaannya Jepang ini terdapat perubahan-perubahan penting yaitu tentang dihapuskannya lelang barang emas atau permata milik rakyat tersebut harus dijual kepada bala tentara Dai Nippon.

5. Pegadaian Dimasa Kemerdekaan (1945 Sampai Sekarang)

Pada bulan Agustus 1945 pimpinan jawatan pegadaian yang dipegang oleh orang-orang Jepang (Ohno), diserahkan kepada MR Sanbari dengan wakilnya MR Prayitno Soewando yang mana dalam struktur organisasinya mengalami perubahan barang-barang logam dilelang kembali.

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 adanya pergolongan-pergolongan menghadapi ambisi sebagian kelompok masyarakat yang justru akan melumpukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pada tanggal 15 November 1946 terjadi peristiwa penandatanganan persetujuan Linggar Jati, dalam hal ini pemerintah Belanda mengakui pemerintah Indonesia de facto di Jawa dan Sumatera, dengan demikian pegadaian-pegadaian di bawah pemerintahan Swapraja di Surakarta, maka pegadaian di daerah Surakarta yang berjumlah 29 buah diserahkan kepada Kantor Pusat PT Pegadaian Negara. Yang berkedudukan di Kebumen mulai tanggal 1 Agustus 1946.

Tindakan pemerintah Republik Indonesia di bidang Keuangan antara lain menciptakan alat pembayaran sendiri yang berupa mata uang Republik Indonesia (ORI) yang diciptakan ini diberlakukan sejak tanggal 30 September 1946.

Pegdaian yang ikut berperan serta disamping Bank-Bank pemerintah lainnya dalam melaksanakan tugas-tugas penukaran ORI tersebut. Dalam bulan Februari 1947, Belanda melakukan pelanggaran atas persetujuan Linggar Jati dengan menyerbu dan menduduki daerah-daerah Mojokerto dan Sidoarjo, Gedongan, Krian dan sepanjang pada tanggal 27 April 1947 kantor dipindahkan ke Magelang dengan maksud mendekati Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Magelang.

Dengan pecahnya kelas 1 Kantor Pusat dipindahkan ke Selamen 17 km disebelah selatan Magelang, hal ini terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, berdasarkan Perjanjian Renville, Belanda berhasil menduduki kota-kota di Jawa Barat kecuali di daerah Banten Timur, Jawa Timur, Madura, Keresidenan Pekalongan, Keresidenan Semarang kecuali Kabupaten purwodadi, keresidenan Banyumas kecuali Banjarnegara, Sumatera Timur dan Sumatera Selatan. Perjanjian Renville ini sangat merugikan Pemerintah Republik Indonesia.

Daerah de facto, RI tinggal di daerah-daerah Yogyakarta, keresidenan Banten, Surakarta Madiun, Kediri, Bojonegoro, Pati, Kedu, kecuali Gombang, Kabupaten Banjarnegara, purwodadi, Jombang, sebagian Malang Sumatera Timur, Sumatera Selatan, dan Padang.

Pegadaian yang berada di daerah-daerah terpotong-potong tersebut keadaanya menjadi lebih para karena dengan timbulnya pemberontakan PKI di Madiun karena pegadaan banyak mengalami kerugian-kerugian karena banyaknya barang-barang yang hilang dibawa PKI, pegawai-pegawai juga banyak

yang terbunuh, sementara itu pemecatan-pemecatan dilakukan terhadap para pegawai yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

4.1.2. Struktur Organisasi PT Pegadaian

Sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan disebut organisasi-organisasi dengan tujuan apapun selalu menggunakan sumber daya (*ressources*), misalnya manusia, barang, uang dan teknologi. Jumlah sumber daya ini terbatas olehnya itu perlu digunakan seefisien dan seefektif mungkin.

Agar dapat bekerja dengan efisien dan efektif maka organisasi membutuhkan informasi tentang sumber daya yang ia miliki dan hasil yang telah di capai dari penggunaan sumber daya tersebut.

Dalam buku pengantar akuntansi 2 (1995; hal. 260) dijelaskan

“Struktur organisasi merupakan kerangka hubungan antara satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh”.

Suatu langkah utama untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab adalah merencanakan organisasi atau mengevaluasi organisasi yang ada adalah *division of work* (pembagian kerja) yang logis, penetapan garis wewenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan dan prestasi sehingga melalui perencanaan yang demikian akan dapat dibuat struktur organisasi yang sehat dan efektif.

Tugas kepala cabang PT Pegadaian tercantum dalam BTP (Buku Tata Pekerjaan) yang diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Jawatan No.2611/40 Tanggal 5 September 1958 yang antara lain:

1. Mengelola modal PT Pegadaian dengan melayani permintaan pinjaman dan pelunasan pinjaman dari para nasabah.
2. Melakukan pelelangan barang-barang jaminan yang telah habis jangka waktunya kepada masyarakat secara terbuka dan untuk umum.
3. Mengumumkan kepada masyarakat/nasabah mengenai tanggal dan waktu pelelangan.
4. Melayani permintaan uang kelebihan (dari hasil lakunya lelang).
5. Melakukan penjualan barang-barang negara yang di beli dari lelang-lelang akibat tidak laku pada lelangan.

Tugas pokok PT Pegadaian:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Mencegah praktek ijin pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lain-lain.

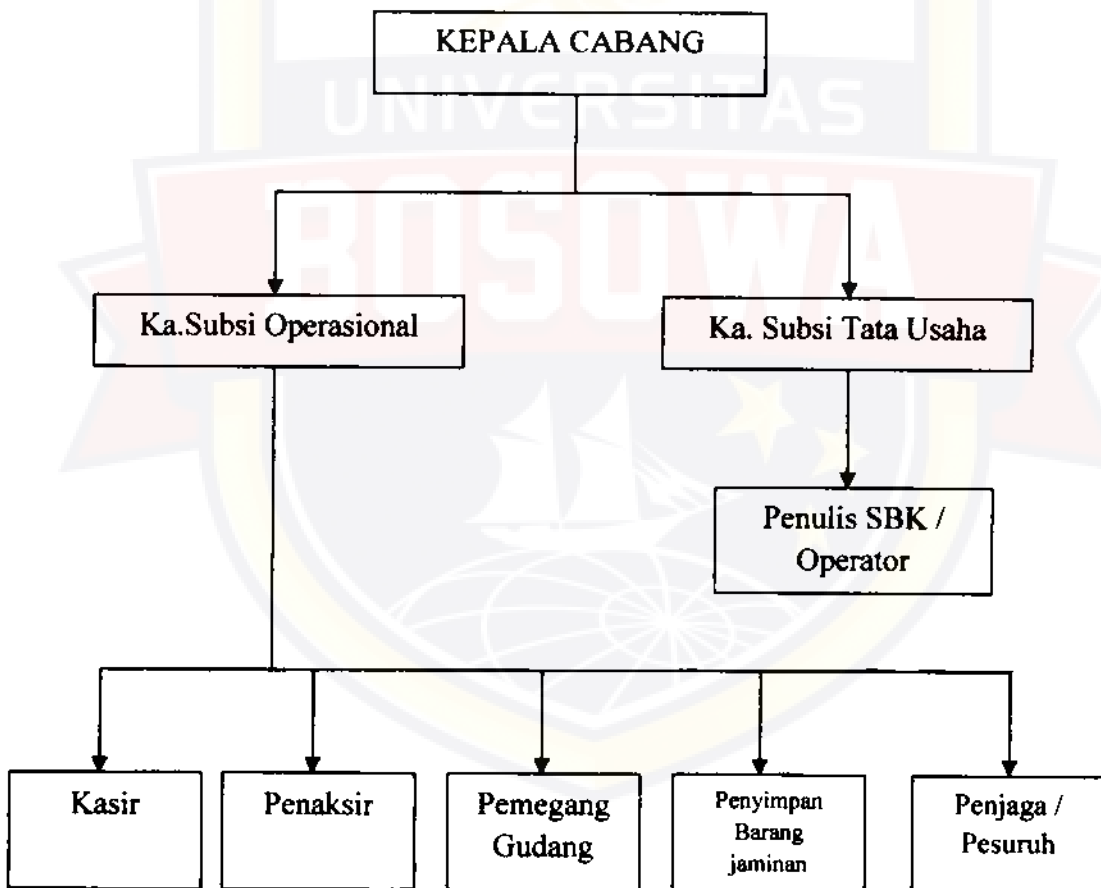
Dalam kondisi perekonomian sekarang fungsi-fungsi eksistensi pegadaian dimata masyarakat dari waktu ke waktu ternyata telah mengalami pergeseran yang positif tidak hanya diakui sebagai salah satu alternatif, tetapi lebih mengarah kebutuhan yang produktif.

Struktur organisasi PT Pegadaian Cabang Jenepono ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pegadaian Nomor Sm. 211129 Tahun 1990 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian yang dipimpin

oleh seorang kepala cabang dan di bantu oleh 36 (sembilan) unsur pelaksanaan pelayanan.

Adapun organisasi dan tata kerja pelaksanaan administrasi dan manajemen pada PT Pegadaian Cabang Jeneponto dapat dilihat pada skema struktur organisasi berikut:

SKEMA 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
PT PEGADAIAN CABANG JENEPONTO



Kedudukan organisasi PT Pegadaian Cabang Jeneponto sebagai unsur pelaksana PT Pegadaian pada tingkat cabang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah PT Pegadaian Makassar.

4.1.3. Uraian Tugas

Organisasi PT Pegadaian Cabang Jeneponto, fungsi dan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

Mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melakukan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan, dengan rincian tugas:

- a. Menyusun program kerja operasional cabang agar berjalan lancar dan sesuai dengan misi perusahaan.
- b. Menetapkan taksiran dan mengkoordinasikan kegiatan penaksiran barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku agar uang pinjaman gadai yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Mengkoordinasikan penyaluran uang pinjaman berdasarkan taksiran barang jaminan agar besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mengkoordinasikan pengembalian uang pinjaman, pendapatan sewa modal dan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengembalian uang perusahaan.
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas barang jaminan.

- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang barang jaminan dan penjualan Barang Sisa Lelang (BSL) serta pembayaran uang kelebihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembalian uang perusahaan dan uang nasabah.
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembukuan transaksi keuangan dan barang jaminan serta memelihara dan merawat kekayaan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan harta perusahaan.
- h. Mengkoordinasikan pengelolaan kas dan giro serta modal kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar modal perusahaan dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha dan pelaporan kegiatan operasional cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi cabang.
- j. Melakukan kegiatan promosi sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pangsa pasar dan citra baik perusahaan.
- k. Mewakili kepentingan perusahaan dalam rangka membina dan memelihara hubungan baik dengan pihak luar.
- l. Membina bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas operasional serta pelayanan yang baik kepada nasabah.
- m. Mengawasi pelaksanaan tugas operasional, keuangan dan sumber daya manusia sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana perusahaan.

- n. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan pendelegasian wewenang operasional sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam program kerja tahun berikutnya
- o. Membangun dan membina budaya pelayanan unggul yang berpedoman pada si Intan.

2. Kepala Sub Seksi Operasi

Menyelenggarakan penyaluran uang pinjaman gadai dan pelaksanaan usaha lainnya sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas operasional berjalan lancar sesuai misi perusahaan, dengan rincian tugas:

- a. Menyiapkan bahan program kerja operasional cabang sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas operasional cabang berjalan lancar dan sesuai dengan misi perusahaan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penaksiran barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku agar uang pinjaman gadai yang diberikan sesuai dengan ketentuan.
- c. Menyelenggarakan pengeluaran uang pinjaman gadai berdasarkan taksiran dan pembayaran uang kelebihan serta melaksanakan kegiatan usaha lain dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Menyelenggarakan penerimaan pelunasan uang pinjaman, sewa modal dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penerimaan kas perusahaan.
- e. Mengelola barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar barang jaminan terpelihara dengan baik.

- f. Melaksanakan lelang barang jaminan, menjual Barang Sisa Lelang (BSL) sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menyelesaikan kredit gadai macet.
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada sub seksi operasional agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.
- h. Membina bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas operasional sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam menyusun program kerja tahun berikutnya.

3. Kepala Sub Seksi Tata Usaha

Melaksanakan tata usaha persuratan, mengelola administrasi keuangan cabang dan melaporkan perkembangan dan statisik perusahaan sesuai peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran operasional cabang, dengan rincian tugas:

- a. Menyiapkan bahan program kerja tata usaha dan keuangan agar tugas operasional cabang berjalan lancar sesuai dengan misi perusahaan.
- b. Menyelenggarakan pengurusan kas giro serta modal kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar modal perusahaan dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna.
- c. Menyelenggarakan pembukuan transaksi keuangan dan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan dan barang jaminan.

- d. Menyelenggarakan urusan tata usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi.
- e. Mengurus dan melaksanakan pembayaran gaji, kesejahteraan pegawai, pajak bumi dan bangunan, retribusi dan biaya lelang dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja perusahaan.
- f. Menyusun laporan statistik dan perkembangan perusahaan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan.
- g. Melaksanakan koordinasi tugas pekerjaan bawahan agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terpadu.
- h. Membina bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam menyusun program kerja tahun berikutnya.

4. Penaksir

Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan, dengan rincian tugas

- a. Menyiapkan sarana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pemberian kredit gadai berjalan lancar.
- b. Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah dan aman dalam rangka mewujudkan citra perusahaan.

- c. Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam rangka menentukan dan menetapkan uang kredit gadai.
- d. Menaksirkan barang jaminan yang akan dilelang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai dalam rangka menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- e. Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan barang jaminan.

5. Kasir

Melakukan penerimaan dan pembayaran untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang, dengan rincian tugas:

- a. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja
- b. Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah.
- e. Penerimaan dari transfer, hasil penjualan lelang dan penerimaan lain-lain.
- f. Melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit, pembayaran uang kelebihan, pinjaman pegawai dan pembayaran peneluaran lain-lain.

6. Pemegang Gudang

Melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan, dengan rincian tugas:

- a. Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan dan keutuhan barang jaminan.
- b. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Kepala Sub Seksi Operasi atau Kepala Cabang sesuai ketentuan yang berlaku untuk di simpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan.
- c. Mengelompokkan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBK, mengatur penyimpanannya agar terlihat rapi dan memudahkan dalam menghitung atau memindahkannya.
- d. Merawat, memelihara, membersihkan barang jaminan dari debu, air dan kotoran lainnya agar barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
- e. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan dalam rangka serah terima jabatan.
- f. Mencatat dan mengadministrasikan mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

7. Penyimpanan Barang Jaminan

Mengelola gudang barang jaminan emas dengan menerima, menyimpan, merawat, mengeluarkan dan mengadministrasikan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang nasabah, dengan rincian tugas:

- a. Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan dan keutuhan barang, jaminan untuk serah terima jabatan.
- b. Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari Kepala Sub Seksi Operasi atau Kepala Cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk disimpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan emas.
- c. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
- d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
- e. Mencatat mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

8. Penulis SBK/Operator

Memasukkan data nasabah, taksiran, dan uang pinjaman ke dalam SBK dari kartu taksiran/formulir permintaan kredit secara akurat, dengan rincian tugas:

- a. Menerima barang jaminan dan kartu taksasi dari KPK
- b. Memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman ke dalam komputer.
- c. Memberi nomor pada kartu taksasi sesuai dengan nomor yang diterbitkan komputer
- d. Memasukkan data bukti kas debit/kredit yang telah dikeluarkan atau diterima oleh kasir
- e. Menerbitkan print out transaksi barang jaminan dan saldo kas.

- f. Mem-file dilipat SBK dan SBK tebusan yang telah diperiksa oleh Sub Seksi Operasi dan penyimpanannya.

9. Satpam

Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya, dengan rincian tugas:

- a. Menjaga keamanan Kantor Cabang
- b. Memberi informasi kepada nasabah bila diperlukan
- c. Mengantar Kepala Cabang atau pegawai bila keluar dinas terutama bila mengambil atau menyetor uang ke Bank
- d. Membantu mengisi dan membagi slip

10. Pesuruh

Memelihara kebersihan, keindahan, dan kenyamanan gedung dan ruang kerja, mengirim dan mengambil surat/dokumen untuk menunjang kelancaran tugas administrasi dan tugas operasional kantor cabang, dengan rincian tugas:

- a. Membersihkan ruangan dan halaman kantor untuk memelihara keindahan dan kenyamanan kantor.
- b. Menyajikan makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu Kantor Cabang.
- c. Mengirim dan mengambil surat dokumen kantor cabang dari kantor pos dan instansi lain dalam rangka menunjang kelancaran administrasi cabang.
- d. Membantu membungkus dan atau mengikat barang jaminan.
- e. Membantu mengangkat barang jaminan ke dalam gudang dan mengeluarkan barang jaminan dari gudang.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Tabel 4.1
PIUTANG DAN LABA BERSIH
PT PEGADAIAN CABANG JENEPONTO
TAHUN 2009-2013

TAHUN	TOTAL PIUTANG	FLUKTUASI %	TOTAL PIUTANG LAIN-LAIN TIDAK LANCAR	FLUKTUASI %	LABA BERSIH	FLUKTUASI
2009	9.588.753.628	0	180.305.789	0	75.109.569.915	0
2010	3.678.271.814	7,92	859.352.315	6,85	21.901.926.542	9,61
2011	3.465.826.917	9,37	631.165.911	7,26	6.141.629.705	7,07
2012	7.263.026.672	11,35	274.830.502	9,55	18.938.865.368	12,06
2013	9.552.020.859	59,82	253.418.549	4,8	24.537.829.366	4,29

Sumber : PT Pegadaian Cabang Jeneponto, 2014

4.2 Deskripsi Data

4.2.1. Prosedur dan Cara Pengambilan / Penjualan Kredit

Dalam hal ini transaksi ekonomi dan keuangan ada dua segi pinjaman yaitu dari segi pemberian kredit adalah orang yang mempercayai misalnya Bank, sedangkan yang menerima kredit adalah orang yang memperoleh kepercayaan (penerima) kredit yang pada pengertian sehari-hari ada yang berupa pinjaman. Maka dalam perkreditan pun penetapannya tidak luput dari kehendak zaman, tetapi masih terdapat inti dari asal mulanya yaitu adanya unsur kepercayaan itu sendiri sebagai golongan ekonomi lemah maupun dari golongan ekonomi kuat, walaupun demikian tidak berarti bahwa di dalam kegiatannya teknik pelaksanaan perkreditan secara nasional yang berpedoman kepada kepercayaan murni tidak sepenuhnya tidak terpakai lagi, tetapi banyak hal dalam kehidupan, dunia usaha bahkan dalam dunia perbankan, unsur kepercayaan masih menyelubungi pertimbangan-pertimbangan kredit.

Disini dimaksudkan agar unsur kepercayaan dalam persoalan kredit tetap dijunjung tinggi serta di jiwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang

menyangkut soal kredit, jika dalam hal ini tetap terpelihara maka orang akan berpikir lebih fleksibel dan demokratis memegang persyaratan yang rasional dan sistematis, khususnya dari mereka yang berwenang dalam mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terutama dalam soal kredit.

Kita tidak boleh lepas dari pengertian piutang yaitu saling percaya mempercayai atau masing-masing tidak akan mengganggu satu sama lain, memegang teguh janji yang diucapkan berdasarkan kepercayaan yang murni, etika yang murni juga menjadi sendi hubungan antara sesama sebagai soko guru keamanan, ketentraman dan kebahagiaan hidup dalam masyarakat antara sesama masyarakat.

Dari unsur saling percaya mempercayai inilah yang dimiliki oleh setiap nasabah yang datang di PT Pegadaian cabang jenepono, dimana timbul dari dalam hati nurani masing-masing maka timbul pula hasrat untuk tolong menolong dan dengan saling balas jasa, tanpa diminta, dalam kehidupan masyarakat di mana alat-alat kebutuhan sehari-harinya misalnya : barang perhiasan, barang pecah belah dan lain sebagainya sudah menjadi kebiasaan sebagai permulaan hidupnya unsur percaya mempercayai. Kemudian memajukan peradaban umat manusia perekonomian khususnya dimana uang dikenal sebagai alat kehidupan, pinjam meminjam, barang menjadi pinjam meminjam uang.

Dalam prosedur penagihan piutang bagi para nasabah yang akan menggadaikan barang sebagai syarat mutlak atas dasar hukum gadai, dan barang jaminan tersebut yang antara lain, barang perhiasan, emas, perak, sepeda, sepeda motor, radio, televisi dan lain sebagainya yang dapat memenuhi persyaratan untuk

dapat dan tidaknya barang tersebut dapat memenuhi syarat sebagai barang jaminan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka sebagai barang yang tidak boleh digadaikan atau larangan-larangan yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Buku Tata Pekerjaan Pegadaian adalah sebagai berikut :

1. Barang Milik Pemerintah

Yang dimaksud adalah semua senjata, pakaian dinas alat perlengkapan ABRI meskipun yang mengadaikan orang sipil, juga perlengkapan milik pemerintah lainnya yang diberikan kepada pegawai sebagai pinjaman.

2. Bahan makanan dan bahan yang mudah busuk atau rusak, termasuk makanan / minuman dalam kaleng, botol atau tembakau dan sebagainya.
3. Barang amat kotor, yang dimaksud adalah barang yang tidak termasuk dalam salah satu larangan untuk diterima sebagai barang jaminan tetapi keadaannya terlalu kotor.
4. Barang memerlukan surat izin atau, larangan penjualannya kalau dilelang seperti senjata api, dan sebagainya, mesin / peluru, senapan angin dan candu kecuali sepeda motor, televisi dan radio.
5. Barang dapat menimbulkan kebakaran / letusan seperti korek, api, petasan, minyak tanah, dan sebagainya.
6. Barang-barang yang tidak tetap harganya atau sukar untuk ditetapkan taksirannya, seperti barang purbakala, buku-buku, alat pemotret (alat lensa), takaran atau timbangan juga yang tidak boleh diterima, barang yang disewa

dibelikan yang ada cap pemiliknya, barang dagangan dalam jumlah besar seperti kain, arloji, berupa emas dan lain-lain.

Uraian tersebut di atas adalah merupakan salah satu ketentuan persyaratan bagi para nasabah dalam menggadaikan barangnya untuk mendapatkan kredit (pinjaman) khususnya PT Pegadaian tetap sebagai nilai taksiran yang selama ini sering timbul adanya barang-barang yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan pinjaman berdasarkan ukuran besar jaminan, sehingga terjadi penolakan atas barang jaminan tersebut, seperti perhiasan emas pun sering terjadi penolakan jika barang jaminan tersebut setelah dilakukan pengujian ternyata bukan emas, mutu rendah, berat barang tidak cukup dan sebagainya.

Persoalan demikian di atas sering terjadi di perusahaan PT Pegadaian Cab. Jeneponto, kepala cabang harus meneliti betul barang jaminan sebelum memberikan piutang (kredit) kepada nasabah.

Adapun sistem dan prosedur pemberian piutang (pinjaman) pada PT Pegadaian Cabang Jeneponto yaitu:

1. Nasabah mengambil formulir permintaan kredit untuk diisi dan dilengkapi dengan bukti pendukung.
2. Barang jaminan dan bukti pendukung serta formulir permintaan kredit di kirim kebagian penaksir.
3. Bagian penaksir, menaksir barang jaminan dan memeriksa kelengkapan bukti dan membuat SBK sebanyak dua lembar, dan dicatat dalam buku penerimaan barang jaminan.

4. Setelah dicatat, kemudian dikirim kebagian kasir untuk melakukan pembayaran, SBK-I didistribusikan ke nasabah
5. SBK-2 dicatat dibagian kasir dalam buku kredit dan kemudian dicatat dalam laporan harian kas.
6. Setelah dicatat, kitir bagian dalam dikirim kebagian administrasi untuk dicatat berdasarkan akuntansi kantor cabang.
7. Kitir bagian luar dikirim kebagian gudang, dan dicatat dalam buku gudang dan barang jaminan dimasukkan dalam gudang.

4.2.2 Sistem penyaluran kredit gadai menurut PT Pegadaian Cabang Jeneponto.

Pada dasarnya industri-industri khususnya yang mempunyai sifat khusus seperti Bank. Pegadaian dan lain memiliki sistem penyaluran kredit yang berbeda dengan industri lain. Ini disebabkan adanya peraturan pemerintah terhadap industri khusus sehingga mengakibatkan adanya sistem penyaluran kredit tertentu yang berbeda.

Sistem penyaluran kredit atas besarnya pinjaman yang diberikan didasarkan pada besarnya nilai barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah disesuaikan dengan pengelompokan barang jaminan. Misalnya pada tanggal 18 November 2013 PT Pegadaian memberikan pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

Golongan A = Rp. 201.500,-

golongan B = Rp. 2.727.500

Golongan C =Rp. 17.000.000,-

golongan D = Rp.33.170.000,-

Maka jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi diatas yaitu:

Pinjaman yang diberikan golongan A Rp.	201.500,-
Pinjaman yang diberikan golongan B Rp.	2.727.500,-
Pinjaman yang diberikan golongan C Rp.	17.000.000,-
Pinjaman yang diberikan golongan D Rp.	33.170.000,-
KAS	Rp. 53.099.000,-

Sebaliknya jika pada tanggal yang sama PT Pegdaian cabang Jeneponto menerima pelunasan utang dengan tingkat golongan A = Rp. 54.500,- B = Rp. 4.282.000,- C = Rp. 20.554.000,- dan D Rp. 57.655.000,-

Maka transaksi tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

Kas	Rp. 82.545.500,-
Pinjaman yang diberikan golongan A Rp.	54.500,-
Pinjaman yang diberikan golongan B Rp.	4.282.000,-
Pinjaman yang diberikan golongan C Rp.	20.554.000,-
Pinjaman yang diberikan golongan D Rp.	57.655.000,-

Perlakuan terhadap tarif sewa modal ditentukan atas dasar presentase perubahan tingkat sewa modal yang diukur berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan. Semakin besar uang pinjaman yang diberikan maka semakin besar pula tarif sewa modal yang harus dibayar.



Tabel 4.2
PERKEMBANGAN JUMLAH NASABAH PADA
PT PEGADAIAN CABANG JENEPONTO
TAHUN 2009 – 2013

Tahun	Target Nasabah (orang)	Realisasi Jumlah Nasabah (orang)	Selisih	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)
2009	1250	1231	19	12,31
2010	1400	1367	33	13,67
2011	1530	1513	20	15,13
2012	1669	1638	31	16,38
2013	1750	1708	42	17,09

Sumber : PT Pegadaian Cab. Jeneponto, 2014.



Berikut ini tabel tentang perubahan tingkat sewa modal menurut PT Pegadaian cabang Jeneponto.

Tabel 4.3
PERUBAHAN TINGKAT SEWA MODAL

Gol	Uang Pinjaman	Sewa Modal Per 15 hari (%)	Max. Jangka Waktu Kredit (hari)	Max. Sewa Modal Dipungut (hari)
A.	50.000 - 400.000	1,25	120	10
AK	50.000 - 400.000	1,25	120	10
AG	50.000 - 400.000	1,25	120	10
BK	400.500 - 1.500.000	1,25	120	10
BG	400.500 - 1.500.000	1,25	120	10
CK	1.510.000 - 5.000.000	1,5	120	12
CG	1.510.000 - 5.000.000	1,5	120	12
DK. 1	5.100.000 - 20 Juta	1,75	120	14
DG. 1	5.100.000 - 20 Juta	1,75	120	14
DK. 2	Lebih besar dari 20 Juta	2	120	16
DG. 2	Lebih besar dari 20 Juta	2	120	16

Sumber : Kantor Cabang PT Pegadaian Cabang Jeneponto

Contoh penerima tarif sewa modal transaksi, pada tanggal 10 Agustus 2010 ibu Nia meminjam uang sebesar Rp. 1000.000,- dengan jaminan emas seberat 10 gram dengan perincian harga sama dengan Rp. 1.250.000,- maka besarnya tarif sewa modal yang harus dibayar yaitu :

Pinjaman	= Rp. 1000.000,-
Tarif sewa modal 1,75 % x Rp. 1000.000,-	= Rp. 17.500 / 15 hari
Atau 12% x Rp. 1.000.000,-	= Rp. 120.000 / 120 hari

Setiap lembar SBK diklasifikasikan berdasarkan golongan barang jaminan dan perubahan tingkat sewa modal dan dicatat dalam buku harian kas.

Misalnya pada tanggal 18 November 2010 PT Pegadaian cabang Jeneponto menerima sewa modal sebesar, golongan A= Rp. 2.300,- golongan B= Rp. 227.600,- golongan C = Rp. 2.580.800,- dan golongan D = Rp. 3.314.650,-

Jurnal yang digunakan :

Kas	Rp. 6.125.350	
Penerimaan sewa modal golongan A	Rp.	2.300,-
Penerimaan sewa modal golongan B	Rp.	227.600,-
Penerimaan sewa modal golongan C	Rp.	2.580.800,-
Penerimaan sewa modal golongan D	Rp.	3.314.650,-



Selain tarif sewa modal yang harus dibayar, maka nasabah diwajibkan membayar biaya pinjaman dan asuransi yang merupakan bagian yang penting dalam sistem penyaluran kredit terhadap pemberian pinjaman.

Tabel 4.4
PENGARUH KEBIJAKAN PIUTANG TERHADAP
PEROLEHAN LABA PADA PT PEGADAIAN CABANG
JENEPONTO TAHUN 2009 – 2013

Tahun	N. Tingkat Piutang (%) (X)	N.Perolehan Laba (Rp. Juta) (Y)	X ²	Y ²	XY
2009	2,10	3.535.000	4,41	12.469.225.000	7.243.500
2010	3,65	4.800.000	13,32	23.040.000.000	17.520.000
2011	5,45	6.145.000	29,70	37.761.025.000	33.490.250
2012	6,25	8.990.000	39,06	80.820.100.000	56.187.500
2013	8,05	9.550.000	64,80	91.202.500.000	76.877.500
N = 5	∑ X = 25,5	∑ Y = 33.020.000	∑ X² = 151,29	∑ Y² = 245.319.850.000	∑ XY = 191.498.750

Sumber = PT Pegadaian Cabang Jeneponto (data diolah)

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisa Korelasi Linear dan Regresi

Untuk mengetahui tingkat keeratan (kekuatan) hubungan antara tingkat piutang terhadap perolehan laba pada PT Pegadaian Cabang Jeneponto.

Maka digunakan analisa korelasi linear dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b x$$

Dimana untuk menghitung nilai parameter a dan b digunakan persamaan sebagai berikut:

$$b = \frac{n \cdot \sum X Y - \sum X \cdot \sum Y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

Berdasarkan data dari tabel tersebut diatas , maka nilai parameter a dan b dapat dihitung sebagai berikut :

$$b = \frac{5 \cdot 191.498.750 - (25,5)(33.020.000)}{5 \cdot (151,29) - (25,5)^2}$$

$$b = \frac{957.493.750 - 842.010.000}{756,45 - 650,25}$$

$$b = \frac{115.483.750}{106,2}$$

$$b = 1.087.417,6$$

$$a = \frac{33.020.000 - 1.087.417,6}{5}$$

$$a = \frac{31.932.582,4}{5}$$

$$a = 6.386.516,48$$

Jadi persamaan nilai tingkat pemberian piutang terhadap perolehan laba pada PT Pegadaian Cabang Jeneponto tahun 2009 – 2013 adalah :

$$Y = 6.386.516,48 + 1.087.417,6 X$$

Dari perhitungan persamaan regresi diatas dapat dilihat bahwa koefisien regresi kebijakan piutang terhadap perolehan laba adalah negatif, berarti diiringi dengan kenaikan atau penurunan perolehan laba. Artinya bahwa bila piutang naik maka perolehan laba akan menurun sebesar 1.087.417,6, sebaliknya bila tingkat

piutang menurun maka perolehan laba akan naik sebesar 1.087.417,6. Sedangkan nilai a adalah rata-rata besarnya perolehan laba.

Setelah ada penjelasan mengenai analisis regresi terhadap tingkat piutang dan perolehan laba, maka selanjutnya yang akan dibahas adalah analisis korelasi guna untuk mencari pengaruh kebijakan piutang (X) terhadap perolehan laba (Y) pada PT Pegadaian cabang Jenepono, maka penulis menggunakan persamaan regresi linear dengan rumus :

$$r = \frac{n \cdot \sum X Y - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}}$$

dimana r = koefisien korelasi X terhadap Y

Berdasarkan data yang penulis kemukakan pada tabel, maka dapat diketahui bahwa :

$$n = 5$$

$$\sum X = 25,5$$

$$\sum Y = 33.020.000$$

$$\sum X^2 = 151,29$$

$$\sum Y^2 = 245.319.850.000$$

$$\sum X Y = 191.498.750$$

Dari hasil tersebut diatas, maka koefisien antara tingkat piutang terhadap perolehan laba adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n \cdot \sum X Y - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}}$$

$$r = \frac{5.191.498.750 - (0,25)(33.020.000)}{\sqrt{5.151,29 - (25,5)^2} \sqrt{5.(245.319.850.000) - (33.020.000)^2}}$$

$$r = \frac{957.493.750 - 842.010.000}{\sqrt{756,45 - 650,25} \sqrt{1.226.599.250.000 - 1.090.320.400.000}}$$

$$r = \frac{115.438.750}{\sqrt{106,2} \sqrt{136.278.850.000}}$$

$$r = \frac{115.438.750}{6,30 (369.159)}$$

$$r = \frac{115.483.750}{232.570.1,7}$$

$$r = 0,496$$

Dimana dari hasil analisis korelasi menggambarkan bahwa koefisien korelasi kebijakan piutang terhadap perolehan laba adalah negatif berarti diiringi dengan kenaikan atau perolehan laba. Artinya bahwa bila piutang naik maka perolehan laba akan menurun sebesar 1.087.417,6, sebaliknya bila tingkat piutang menurun maka perolehan laba akan naik sebesar 1.087.417,6. Sedangkan nilai 6.386.516,48 adalah rata-rata besarnya perolehan laba. Analisis korelasi menggambarkan bahwa hubungan kebijakan piutang terhadap perolehan laba sebesar 0,496 (50%). Hubungan ini erat kaitannya, artinya bila tingkat piutang turun maka perolehan laba menurun, sebaliknya bila tingkat piutang turun maka perolehan laba akan naik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis kemukakan dalam hipotesis terhadap masalah pokok yang dikemukakan dalam skripsi, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Besarnya pengaruh kebijakan piutang pada PT Pegadaian Cabang Jeneponto periode 2009 – 2013, dapat ditunjukkan dari hubungan tidak langsung. Dengan melihat hasil regresi 0,496
2. atau 50%, sehingga dapat diketahui tingkat pemberian piutang berhubungan erat dengan nilai perolehan laba.
3. Bahwa perolehan laba yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berproduksi, karena dengan peningkatan produksi, akumulasi dapat terbentuk dan hasilnya akan meningkatkan kebijakan dalam pemberian piutang.
4. Pelaksanaan sistem pemberian piutang dianggap jelas memadai, hal ini ditandai dengan meningkatnya pemberian piutang dari masyarakat.

5.2 Saran – Saran

Berangkat dari kerangka teori, pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberikan / sumbangsih saran kepada PT Pegadaian Cab. Jeneponto mengenai pentingnya pemberlakuan kebijakan piutang terhadap perolehan laba antara lain :

1. Penerapan kebijakan piutang sebaiknya diserahkan sepenuhnya oleh pasar, dikarenakan terlalu banyak campur tangan pemerintah akan berakibat

semakin tidak menentukannya kegiatan perekonomian secara keseluruhan, bila penentuan besarnya kebijakan piutang diserahkan kepada pasar, maka nantinya akan mendorong sendiri tingkat pemberian piutang tersebut.

2. Walaupun sistem dan prosedur pemberian piutang yang dilaksanakan PT Pegadaian Cab. Jeneponto dianggap telah memadai, namun demikian masih perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam rangka pengembangan perusahaan, sepanjang tidak mempengaruhi yang telah berfungsi sebagai mana mestinya.
3. Disarankan pula agar perlunya pemberlakuan kebijakan piutang secara efektif dan efisien untuk menunjang pemberian piutang, khususnya PT Pegadaian Cab. Jeneponto.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani Dwi Ariska . 2010. **Pengaruh Laba Kotor, Laba Operasioanal dan Laba Bersih dalam memprediksi Arus Kas Di Masa Mendatang.**Skripsi Sarjana FE UNDIP.Semarang.
- Astuti , Dewi . 2004 . **Manajemen Keuangan Perusahaan** , Jakarta : Ghalia Indonesia
- Damanhur, Leli Darwina. 2006. **Jurnal Aplikasi Manajemen**, Jakarta : Dikti
- Daryanto,S. S . 2000 . **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Surabaya : Apollo
- Hasan. 2003. **Pegadaian**, Jakarta Akbar Media Suara.
- Kasmir . 2010. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya** , Jakarta : Graha Graffindo Pers
- Martono dan Agus Harjito, 2001. **Manajemen Keuangan**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit : Ekomisia.
- Muclish, Mohammad. 2003 . **Manajemen Keuangan Modern** , Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2004. **Statistika Untuk Penelitian**, Cetakan Kedelapan. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. 2000. **Manajemen Keuangan, Teori Konsep dan Aplikasi**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit: Ekonesia, Jogjakarta.
- Syamsuddin, Lukman . 2007 . **Manajemen Keuangan Perusahaan** , Jakarta : Raja Grafindo Perdasa
- Tisnawati Sule Ernic, Kurniawan Saifullah. 2006. **Pengantar Manajemen** , Cetakan Kedua , Edisi Pertama, Jakarta : Kencana
- Triandaru, S. Budisantoso, T. 2006. **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Jakarta: Salemba Empat.
- Universitas Hasanuddin. 2005.**Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi**. Makassar.